



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
**KECAMATAN PANYILEUKAN**

Jalan Soekarno Hatta Km 12,5 Bandung  
Tlp. 022-7812727 Email : KecPanyileukan@gmail.com

Bandung, 20 Maret 2023

Nomor : B/KI.04.02/101 - Kec.Nyileuk/III/2023  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Daftar Informasi Publik dan Daftar  
Informasi yang Dikecualikan Kecamatan  
Panyileukan

**Kepada :**

Yth. Kepala Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kota  
Bandung

di-

**BANDUNG**

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Daerah Kota Bandung Nomor 011-DISKOMINFO/2023 tanggal 20 Januari 2023 perihal Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023.

Bersama ini kami sampaikan Rekapitulasi Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kecamatan Panyileukan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023, sebagaimana format terlampir.

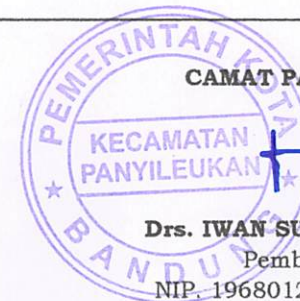
Demikian untuk menjadi maklum dan agar dapat dijadikan bahan selanjutnya.

**CAMAT PANYILEUKAN**  
  
**Drs. IWAN SUMARYANA, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19680125 198903 1 004

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA SKPD KECAMATAN PANYILEUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

<b>NO</b>	<b>KONTEN INFORMASI</b>	<b>DASAR HUKUM</b>	<b>BATAS WAKTU PENGECUALIAN</b>	<b>AKIBAT JIKA INFO DIBUKA</b>	<b>MANFAAT JIKA INFO DITUTUP</b>
1	Data Pemohon KTP dan KK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh orang lain (pemalsuan)	Melindungi data pribadi (masyarakat)
2	Arsip Pertanahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh orang lain (pemalsuan)	Melindungi data pribadi (masyarakat)
3	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Daftar keuangan dan pendapatan/rekening PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Daftar nilai DP-3 PNS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No. 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	1 Tahun	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
8	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
9	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan structural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
10	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
11	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres NO.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
12	Dokumen Penawaran Kontrak	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Keppres No.80 Tahun 2003 beserta perubahannya	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Munculnya persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
13	Internet Protocol /IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan /Penyalahgunaan hak akses	Menjaga /melindungi hak akses
14	Bandwidth Management	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan Penggunaan Bandwidth
15	Sistem Keamanan Elektronik	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak lain	Menjaga Keamanan Database
16	Hasil : - Pemeriksaan Reguler, - Pemeriksaan Kasus, - Pemeriksaan Khusus,  - Review Laporan Keuangan, - Evaluasi Pemantauan	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 6 huruf c ayat 6 dan pasal 17 huruf i, - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik pengawasan dan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Item Pemerintah, bab/no. 4500 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 tentang norma Pengawasan dan kode etik pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I Bab Norma - Permendagri 51 Th. 2010 ttg Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemda	Tidak Terbatas	- Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya - Melanggar PP tentang batasan distribusi LHP.  - Melanggar Peraturan MENPAN tentang batasan distribusi LHP.	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan.



**CAMAT PANYILEUKAN**

KECAMATAN  
PANYILEUKAN

**Drs. IWAN SUMARYANA, M.M**

Pembina Tk. I

NIP. 19680125 198903 1 004